

PEMETAAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KELAPA SAWIT DI DAS: KASUS DAS SIAK 2005-2010

Khairul Anwar¹, Wan Asrida, Syamsul Bahri

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menemukan peta konflik yang terjadi disekitar DAS Siak dan strategi seperti apakah yang dapat diterapkan dalam mengelola konflik desa perkebunan berbasis DAS Siak tahun 2005-2010. Metode yang digunakan dalam mencapai tujuan itu adalah dengan cara mengidentifikasi; (1) Siapa saja aktor yang terlibat dalam konflik itu? (2) Apa yang menjadi kepentingan para aktor mengenai kebijakan perkebunan kelapa sawit; (3) Apa preferensi politik para aktor lokal dan, (4) Bagaimanakah cara para aktor dan masyarakat lokal tersebut mengorganisir diri dan berkoalisi dengan kelompok-kelompok sosial dalam mengelola konflik yang akan dan sudah terjadi? Hasil studi tahun pertama diharapkan menghasilkan data base pemetaan, dan langkah-langkah pengelolaan aktor dalam situasi konflik DAS di Riau. Hasil studi tahun pertama ini diharapkan bisa menjadi deskripsi (data) awal pemetaan interaksi aktor dalam situasi konflik DAS di Indonesia

Kata kunci: *Pemetaan social-politik, strategi, dan kepentingan aktor*

PENDAHULUAN

Sejak diterapkannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Riau, nampak konflik semakin marak terutama yang berbasis dengan kebijakan pengelolaan sumber daya alam (SDA). Studi Casson (2000), Hidayat (2001), Almasydi (2003), dan Khairul (2009) menunjukkan bahwa konflik ini tidak hanya melibatkan pemerintah (Daerah), perusahaan, masyarakat lokal, tetapi sudah melibatkan dunia internasional. Secara faktual konflik itu terlihat antara lain dari friksi antara gubernur dan wakil gubernur Riau, 2005² (*Riau Tribune*,

¹ Adalah staf pengajar jurusan ilmu Pemerintahan Fisip dan Ketua Program Studi Ilmu Politik Pascasarjana Universitas Riau, 2012

² Friksi kepentingan dalam isu proyek kebun kelapa sawit ini terjadi antara Gubernur dan Wakil Gubernur Riau muncul kepermukaan setelah DPRD Riau membahas soal teknis dan anggaran proyek

20,2005), dan konflik masyarakat dengan kelompok internasional misalnya *green feace*

Pengamatan awal menimbulkan dugaan bahwa konflik ini berkaitan dengan kebijakan publik mengenai perkebunan kelapa sawit. Penelitian ini bermaksud meneliti masalah dinamika politik dalam kebijakan desentralisasi. Untuk menelaah dinamika itu, dikaji proses kebijakan perkebunan kelapa sawit di DAS Siak. Studi ini dilakukan berdasarkan asumsi bahwa kebijakan publik adalah akibat dari pergulatan politik³. Sebab pergulatan politik akan menghasilkan siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana seperti yang ditulis oleh Lasswell (1936)⁴.

Dalam bagian ini hendak diuraikan karya-karya yang relevan dan menjadi sumber inspirasi bagi penelitian ini, yaitu : (1) studi ekonomi-politik dalam kaitan formulasi kebijakan desentralisasi , (2) kajian tentang disharmonisasi kebijakan sosial-ekonomi Riau yang berkaitan perkebunan; dan (3) karya mengenai perpolitikan lokal pasca ORBA di Riau. Uraian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai apa yang telah diketahui oleh para peneliti terdahulu mengenai persoalan ekonomi politik dalam kaitan harmonisasi kebijakan perkebunan perkebunan di Riau.

Robert H. Bates⁵ (1981) melakukan penelitian mengenai kaitan antara proses kebijakan dengan krisis pertanian di Afrika. Untuk menjelaskan itu, Bates melakukan analisis terhadap para pembuat keputusan dengan menerapkan asumsi bahwa kebijakan publik itu adalah akibat dari pergulatan politik antar aktor. Analisis Bates menunjukkan kaitan antara kebijakan pertanian yang dibuat oleh pemerintah di Afrika dengan dinamika hubungan antar kelompok kepentingan dalam arena politik. Studi ini menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan pertanian merupakan hasil interaksi politik antara pemerintah dan produsen perkotaan. Untuk konteks Indonesia, gambaran oleh Bates diatas sejalan

kebun Kelapa sawit .Wakil Gubernur sepakat dengan sikap DPRD Riau yang menunda, meskipun Pemerintah. Provinsi Riau bersekeras melaksanakan.

³ Istilah pergulatan politik dimaksudkan adalah persaingan antar aktor memperjuangkan kepentingan

politik, institusional maupun individual dalam arena politik.

⁴ Lasswell, Harold, " *Politics: Who, Gets, What, When, and How*",

⁵ Studi Bates (1981) ini sekaligus menjadi inspirasi penulis dalam melakukan penelitian disertasi.

Penelitian yang dilakukan Bates (1981) adalah studi yang terbaik dalam tradisi teori aktor rasional

yang diterapkan di negara-negara berkembang. Lihat Malarangeng (2004).



dengan uraian para peneliti lainnya, salah satu contohnya adalah karya Andrew MacIntyre.

Studi MacIntyre (199) ini relevan untuk dibicarakan demi mempertajam kerangka analisis yang diajukan Bates. Studi ini, pada dasarnya bertumpu pada eksplanasi "*interest-group politics*". MacIntyre meneliti politik persaingan antar-kelompok di Indonesia pada masa Orde baru yang menekankan interaksi antar kelompok dalam memformulasikan kebijakan. Dalam studi ini, MacIntyre mengembangkan konsep "*Bureaucratic Pluralism*" dari Donald Emmerson dan "*Restricted Pluralism*" dari R. William Liddle. Menurut para ilmuwan politik pluralis ini, perpolitikan Orde baru tidak sepenuhnya "solid" dan "tertutup". Pertama, birokrasi pemerintah pada masa itu tidak bebas dari perselisihan politik internal. Berbagai kelompok dalam birokrasi, mewakili kepentingan institusi (misalnya, departemen A versus departemen B) atau individu (misalnya, menteri A atau menteri B), memperjuangkan kepentingan politik yang berbeda, walaupun dalam batas-batas yang ditolerir oleh sistem otoriter itu. Dalam birokrasi masa otoriter itu masih dimungkinkan adanya pluralism kepentingan politik. Emmerson menyebut fenomena ini sebagai "*bureaucratic pluralism*" (MacIntyre, 1991: 10-11). Kedua, proses pembuatan keputusan waktu itu juga tidak kedap pengaruh dari luar birokrasi, yaitu pengaruh dari para aktor non-negara. Dalam sektor-sektor kebijakan yang secara politik dianggap tidak strategis, yaitu tidak menyangkut isu keamanan nasional dan isu politik tingkat tinggi lainnya, proses pembuatan kebijakan itu bisa mentolerir pengaruh dari luar. Studi Emmerson mengenai proyek industri di Sumatera, pengkajian Liddle mengenai kebijakan pertanian beras dan gula, dan penelitian MacIntyre mengenai kebijakan pemerintah dalam regulasi industri tekstil, farmasi dan jasa asuransi, yaitu sektor-sektor penting dalam ekonomi tetapi tidak menyentuh isu politik-keamanan, menunjukkan bahwa perpolitikan Orde baru cukup pluralistik. Beberapa kelompok kepentingan bisa mempengaruhi hasil akhir proses kebijakan publik. Dinamika perpolitikan kelompok itu tercermin dalam proses kebijakan itu. Hasil akhir proses kebijakan itu tidak hanya ditentukan secara sepihak oleh pemerintah. Liddle menyebut fenomena ini sebagai "*restricted pluralism*". Berlangsung perpolitikan yang pluralis, tidak sekadar manolitik, tetapi terbatas hanya dalam sektor-sektor yang non-politik dan non-keamanan (MacIntyre, 1991: 16-18).

Studi ekonomi-politik lainnya yang berkaitan dengan perkebunan kelapa sawit dilakukan oleh Anne Casson. Hasil penelitian Casson (2000) menunjukkan bahwa Kelapa sawit merupakan salah satu subsektor pertanian yang paling dinamis di Indonesia. Pertumbuhan kelapa sawit yang pesat ini didorong oleh faktor kebijakan ekonomi pemerintahan Soeharto. Studi yang terkait politik lokal, dilakukan oleh Vedi R. Hadiz (2002) mengenai bangkitnya politik lokal kasus Sumatera Utara pasca runtuhnya Orde Baru.

Berbagai studi di atas pada dasarnya memfokuskan diri pada isu harmonisasi kebijakan. Perbedaan diantara studi diatas, yaitu Bates (1981) menekankan pada kebijakan pertanian, MacIntyre (1991) dan Liddle (1991) menekankan bahwa proses pembuatan keputusan tidak kedap dari pengaruh luar birokrasi, Casson (2000) lebih memperhatikan kebijakan masa transisi rezim, Hadiz (2002) memfokuskan diri pada proses kebijakan politik lokal. Kajian-kajian



itu banyak membahas formulasi kebijakan masa ORBA dan menekankan sisi untung-rugi ekonomis.

Penelitian ini fokusnya pada dinamika politik dalam kebijakan di tingkat lokal masa pasca ORBA yang menggunakan isu kebijakan kelapa sawit sebagai pintu masuk. Studi mengenai perkebunan selama ini tidak mengkaitkannya dengan persoalan politik lokal. Karena itu, penulis berharap agar studi ini mempunyai arti dalam mengisi kekosongan khasanah kajian politik lokal dan otonomi daerah di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, studi ini berusaha untuk menjawab pertanyaan pokok penelitian sebagai berikut, yaitu (1)Siapa saja aktor yang terlibat dalam konflik itu? (2)Apa yang menjadi kepentingan para aktor mengenai kebijakan perkebunan kelapa sawit; (3) Apa preferensi politik para aktor lokal dan,(4) Bagaimanakah cara para aktor dan masyarakat lokal tersebut mengorganisir diri dan berkoalisi dengan kelompok-kelompok sosial dalam mengelola konflik yang akan dan sudah terjadi di DAS Siak 2005-2010? Hasil studi ini diharapkan bisa menjadi pemetaan jaringan kepentingan bagi kebijakan sawit dalam situasi konflik di DAS di Siak.

METODE

Jenis penelitian ini adalah studi kasus (*case study*). Alasan penulis menggunakan metode ini ialah: *pertama*, studi pemetaan dan strategi pengelolaan konflik di daerah aliran sungai,kasus pembangunan sawit sekitar DAS Siak 2005-2010

melibatkan banyak variabel. Dalam kondisi seperti itu , sedikit variabel yang dapat dikontrol secara jelas. Untuk mengatasinya, dipilihlah strategi penelitian studi kasus. Sumber data yang dipergunakan dalam studi ini adalah data sekunder maupun primer. Sumber data skunder diperoleh dari bahan dokumen yang berkaitan dengan perkebunan kelapa sawit, baik dicetak ataupun elektronik. Sumber data sekunder ini adalah; laporan penelitian, jurnal ilmiah, buku-buku, Peraturan perundangan, surat kabar Riau Pos, Riau Tribune, Riau Mandiri, Kompas, Tempo, peta lokasi, selebaran, risalah rapat, data direktori perusahaan perkebunan yang diterbit Badan Pusat Statistik (BPS), dan bahan yang bersumber dari websites in-ternet.

Selanjutnya, sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh lokal yang mengetahui sejarah dan pembangunan perkebunan kelapa sawit di DAS Siak yang berada pada tiga desa yang memiliki luas lahan sawit ; Dosan,Benayah,dan Perincit. Tujuan wawancara itu adalah: *Pertama*, untuk mengungkapkan dukungan masing-masing aktor terhadap pilihan kebijakan kelapa sawit; *Kedua*, untuk mengumpulkan data lebih lengkap mengenai elit kebijakan perkebunan; dan *Ketiga*, untuk memperoleh pemahaman tentang bagaimana aktor mengorganisir diri dan berkoalisi dengan kelompok social lain . Sebelum memilih aktor lokal terlebih dahulu perlu menyusun peta sementara elit lokal. Secara umum kajian ini membagi dua kategori aktor konteks



lokal, yaitu aktor pemerintah dan non-pemerintah. Aktor pemerintah baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan seperti: Bupati, Kepala Dinas perkebunan, Kepala Dinas kehutanan, Badan pertanahan nasional (BPN), Ketua atau anggota DPRD kabupaten, tokoh bisnis, tokoh politik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, pengusaha swasta perkebunan (domestik, internasional), pengusaha Negara perkebunan, dan perorangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di Siak.

Selain itu, data primer diperoleh juga melalui observasi langsung dengan membuat kunjungan lapangan kepada peristiwa yang terkait isu kebijakan kelapa sawit. Observasi ini meliputi rapat terbuka, pertemuan, demonstrasi, kunjungan ke lokasi perkebunan. Tujuan observasi ini adalah untuk memotret kondisi lingkungan politik yang relevan dan memuat karakteristik kasus. Dalam observasi ini data diperoleh berupa: foto, selebaran, catatan, naskah orasi atau pidato aktor, pesan spanduk.

Data yang dikumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan *Modern Political Economy* yang memuat empat langkah seperti yang dijelaskan Frieden (1991) yaitu: *Pertama*, merumuskan atau mengidentifikasi aktor-aktor yang “mendukung” atau yang “menolak” kebijakan perkebunan kelapa sawit di Riau, dan menentukan apa yang menjadi tujuan dan kepentingannya. *Kedua*, menggambarkan preferensi masing-masing aktor mengenai kebijakan perkebunan kelapa sawit yang akan diterapkan di DAS Siak. *Ketiga*, mendiskripsikan bagaimana para aktor berkoalisi dalam mencapai tujuan. *Keempat*, menganalisis bagaimana para aktor berinteraksi dengan lembaga-lembaga sosial lainnya dalam rangka memperjuangkan kepentingan untuk mencapai tujuan.

HASIL

Sebagaimana telah disinggung didepan, para aktor yang terlibat dalam penerapan kebijakan kebun sawit di sekitar DAS Siak dapat diklasifikasikan yang bersifat mendukung, menolak, dan menerima dengan syarat. Dinamika respon para aktor dalam penerapan kebijakan ini sangat ditentukan oleh karakteristik perpolitikan Pemda yang berlaku dan karakteristik khas ini mewarnai perpolitikan lokal di Riau khususnya di Siak. *Pertama*, kelompok mendukung yang diwakili Kepala Desa. Para aktor birokrasi memiliki kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi lokal. Para elit lokal Riau memperebutkan kendali atas proses kebijakan perkebunan kelapa sawit dan secara individual atau terlembaga misalnya mengejar PBB, lahan HGU, pendapatan anggota koperasi, seperti yang diungkapkan oleh salah seorang informan. Perbedaannya hanya terletak pada sarana, basis dukungan, dan aktor yang semakin kompleks.

Dalam kasus kelapa sawit DAS Siak, para aktor utama birokrasi lokal, politisi, pengurus koperasi (lama), dan pengusaha masing-masing memperjuangkan kepentingannya, birokrat menjadikan kelapa sawit sebagai basis materil dalam mempertahankan dan menanam pengaruh kedalam struktur kekuasaan lokal. Para pengurus koperasi memanfaatkan institusi lokal, sebagai



motor penggerak untuk mengontrol modal, perizinan, dan sumberdaya politik yang lebih efisien. Kemudian, para pengusaha perkebunan melakukan tindakan-tindakan dalam rangka mengontrol struktur produksi kebun yang dikuasai di tingkat lokal..

Selain itu, para aktor juga memakai simbol-simbol tradisional berbasis etnik yang ada di tingkat lokal. Situasi itu lahir dari sifat kebijakan pembangunan yang eksploitatif dan diperparah oleh kondisi pengusaha-pengusaha lokal yang relatif memiliki modal tetapi terbatas akses kepada proses pengambilan keputusan di tingkat pusat.

Tabel 1. Peta Politik Isu Kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit
Di DAS Siak 2005-2010

Elemen Aktor	Kepentingan	Arena	Jaringan	Siasat-siasat	Kelompok Pendukung
Aktor Mendukung	PAD, ganti rugi, akses keputusan, kesempatan kerja, kemakmuran	Birokrasi Kabupaten, kecamatan, Desa, DPRD Parpol, Koperasi	Birokrasi, Parpol, Kelompok Sosial, Pengusaha sawit Perslokal, Perusahaan.	Keputusan Bupati, Negosiasi, memanfaatkan jaringan Organisasi Koperasi, Revitalisasi Koperasi, DPRD, LSM, Tokoh masy. Lokal, Merangkul Tokoh lokal, perusahaan	Birokrasi, Parpol PBS/PBN, Koperasi, Toko h lokal
Aktor Yang Menolak	ganti rugi lahan, hasil produksi, akses keputusan, kesempatan kerja, semangat membangun daerah	Anggota koperasi,	Tokoh masyarakat, LSM, nasional/Internasional, kelompok loka	Merangkul Tokoh lokal,	Politisi, LSM

Sumber: observasi, wawancara, dokumentasi, 2013.

Para pengurus koperasi "Bina Usaha Tani Utama." yang difasilitasi pemerintah bersaing dengan tokoh masyarakat (sekaligus anggota koperasi) memperebutkan kendali proses pengambilan keputusan dalam mengelola koperasi. Kebijakan publik adalah hasil dari pergulatan politik. Sebab pergulatan politik akan menghasilkan siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana. Oleh

karena itu, kebijakan publik mengenai kelapa sawit di di DAS Siak adalah sebagai hasil dari pergulatan politik lokal. Aktor-aktor dengan kepentingan, preferensi, basis instiusional yang berbeda-beda berinteraksi dalam mempengaruhi penerapan kebijakan perkebunan kelapa sawit di Riau. Harmonisasi interaksi antar aktor inilah yang menentukan sinergisitas kebijakan perkebunan kelapa sawit di Riau lintas kementerian era desentralisasi .

Tabel.2.

BENTUK dan DAMPAK KONFLIK

BENTUK-BENTUK KONFLIK		SIAPA ? YANG BERKONFLIK		DAMPAK		CATATAN PERKEMBANGAN
HORIZONTAL	VERTIKAL	INDIVIDU	KELOMPOK	PENDEK	PANJANG	
Antara petani dan pengurus koperasi Antara pengurus dengan pengurus koperasi	Antara Petani dengan pemerintah Kabupaten dan Kecamatan	Petani Anggota Koperasi	Koperasi dan Pemerintah Pengurus koperasi dan perusahaan perkebunan	- Penurunan penghasilan - Restrukturisasi pengurus koperasi	Konflik kebijakan	Konflik terjadi dalam kondisi perubahan mata pencaharian dari nelayan ke penjual kayu dan keperkebunan

Sumber: Observasi,wawancara,2013

Tabel. 3. POTENSI PENYEBAB KONFLIK

FAKTOR PENYEBAB KONFLIK	FAKTOR PEMICU	FAKTOR PENYEBAB MEMBESAR KONFLIK
<ul style="list-style-type: none"> • Kesenjangan pendapatan • perbedaan sumber daya 	<ul style="list-style-type: none"> • Pergeseran mata pencaharian • Perubahan lingkungan • Karakteristik masyarakat heterogen 	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi personal • Kebijakan “komplementer” • Pengambilan keputusan terpusat

Sumber:observasi,wawancara, 2013

Kedua, kelompok yang menolak pengelolaan sawit di Das Siak diwakili tokoh lokal. Kepentingan langsung Tokoh lokal ini sesungguhnya tidaklah jelas seperti yang diungkapkan oleh salah seorang nara sumber. Sementara kepentingan tidak langsung hanyalah bersifat normatif, yakni membentuk opini publik mengenai hak-hak masyarakat lokal yang dimiliki secara turun temurun. Kendatipun demikian, kelompok yang menolak manajemen koperasi yang mengelola sawit Pemda memiliki komitmen yang sangat tinggi kepada daerah misalnya memperjuangkan agar hak-hak anggota koperasi nota bene masyarakat setempat tidak dirampas oleh tokoh-tokoh pengurus (koperasi) yang lama dalam memanfaatkan hasil perkebunan demi kepentingan kelompoknya dan memberikan sebahagian lahan kepada kelompok masyarakat di luar desa. Untuk itu, tokoh ini mengikuti secara seksama setiap isu pembangunan perkebunan sejak awal di buka hingga dewasa ini. Setelah pengurus koperasi lama tidak bertugas lagi, kelompok ini semakin terbuka menanamkan pengaruh politik dalam proses kebijakan sawit di DAS Siak.

STRATEGI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KONFLIK PERKEBUNAN SAWIT DI DAS SIAK

KELOMPOK PEMERINTAH		KELOMPOK NON-PEMERINTAH		
“MENOLAK”	“MENERIMA”	“MENERIMA” (garis lunak)	“MENERIMA DGN SYARAT” (moderat)	“MENOLAK” (radikal)
Berkepentingan kuat mempertahankan kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan	Bersedia melakukan negosiasi dengan kelompok pemerintah tentang kemungkinan liberalisasi dan demokratisasi politik	Bekas pendukung kelompok pemerintah tanpa komitmen serius pada kebijakan sawit tetapi berharap dapat keuntungan dari proses itu	Mendukung kebijakan sawit tetapi masih menghormati posisi tokoh lokal tradisional dan kepentingan lokal	Menuntut transformasi demokratis secara besar-besaran dan tidak mau berkompromi dengan pemerintah (Daerah)

Sumber:observasi,wawancara,2013

Ketiga, kelompok menerima dengan syarat yang diwakili Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD sebenarnya mempunyai kekuasaan politik yang sangat besar sebagai representasi dari seluruh rakyat yang dipilih melalui Pemilu. Kedaulatan masyarakat lokal menguat setelah diterapkannya desentralisasi pada masa pasca ORBA. Dalam kasus kebun Sawit Masyarakat yang diterapkan Pemerintahan Kabupaten Siak (Keputusan Bupati no.269.2/HK/KPTS/2006), DPRD Siak sepanjang yang dapat diamati dapat menerima dengan sejumlah syarat terhadap usulan kebijakan perkebunan kelapa sawit . Kendatipun kemudian, lembaga politik ini memposisikan diri menerima kebijakan. Penolakan ini dilakukan DPRD Siak karena usulan kebijakan perkebunan itu dinilai tidak jelas teknis pelaksanaan maupun konsep anggaran.

Dari pembahasan diatas apa yang dapat disimpulkan bahwa arena interaksi yang dipakai para aktor semakin banyak dan jaringan para aktor semakin tumpang tindih. Masing-sing aktor kebijakan berupaya memaksimalkan perolehannya melalui program sawit Pemda. Persaingan aktor merebutkan manfaat kebun sawit memuncak dalam rapat koperasi yang dihadiri pemerintah kecamatan. Saling lempar tanggungjawab tidak hanya antara pengurus lama dan anggota. Tetapi terjadi juga antara pemerintah dan tokoh lokal. Selain itu, hampir semua anggota mempersoalkan kinerja pengurus koperasi lama dalam rapat pengurus. Dalam situasi itulah strategi pengendalian interaksi para aktor yang menerima dari kelompok pemerintah terhadap kelompok garis lunak kelompok non-pemerintah dapat dilakukan sembari merangkul kelompok garis keras. Strategi inilah yang mewarnai proses kebijakan perkebunan kelapa sawit dan kemudian mewarnai perpolitikan di DAS Siak.

DAFTAR RUJUKAN

- Awang, San Afri (2005) ”Sejarah Pemikiran Pengelolaan Hutan Indonesia” dalam *Wacana* Edisi Tahun J. VI 2005.h.15
- Syahza, Almasdi (2004) *Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan Melalui Pengembangan Industri Hilir Berbasis Kelapa Sawit di Daerah Riau*. (Disertasi), Bandung: PPS-Unpad.
- Azriat dan Aris (2006) ”Sawit Sumber Penghancur Kehidupan Masyarakat”, dalam *Tandan Sawit.Sawit Wacth*.12. Vol.2 Tahun 2006.h.12.
- Bahari, Syaiful (1996) ”Konflik Agraria DI Wilayah Perkebunan: Rantai Sejarah Yang Tak Berujung” dalam *Jurnal Analisis Sosial* Vol.9,No.1 April 2004.

- Bandrun,M (1995) *Pelaksanaan PIR Perkebunan dan Arah Pengembangan*, Makalah.hal.33,Pekanbaru:Disbun Riau.
- Casson, Anne (2000) *The Hesitant Boom: Indonesia's Oil Palm Subsektor in an Era of Economic Crisis and Political Change*, *HTTp/w.wOccasional paper no.29*.
- Dinas Perkebunan (2003) *Evaluasi Pembangunan perkebunan Provinsi Riau*, Pekanbaru, Pekanbaru: Pemda Riau.
- Dirjen Bangda (2007) *Penataan Ruang Daerah*. (makalah) Seminar RencanaTata Ruang Wilayah Provinsi, Pekanbaru: Bappeda Riau.
- Djasit, Saleh (2002) *Peran Kelapa Sawit Dalam Otonomi Daerah: Prosedur Pengembangan Kelapa Sawit dan Pabrik di Provinsi Riau* (makalah) Lokakarya Jakarta: Departemen Pertanian.
- Hidayat, Donny (2006) *Analisis peranan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau dalam Era Otonomi Daerah*, Thesis, Sekolah Pascasarjana IPB Bogor.
- Ibrahim, Jonaidi "Penerapan Berbagai Pola Kemitraan dalam Rangka Percepatan pembanguna perkebunan Rakyat di Riau dalam Pelita VI", dalam *Pola Kemitraan dalam Pengembangan Pertanian*, Jurnal. hal. 83-99